

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

**PENINGKATAN PELAYANAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN BERBASIS
DIGITAL DALAM PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
(PKKPR) BERUSAHA
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**



Disusun oleh:

Rangga Alfiandri Hasim., S.ST., M.H

NIP. 198505162005021003

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Aksi Perubahan diajukan oleh:

Nama : Rangga Alfiandri Hasim, S.ST., M.H.
No. Absen : 06
NIP : 198505162005021003
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
Pelatihan : Pendidikan Kepemimpinan Pengawas
Angkatan : I
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik

Judul Aksi
Perubahan:

**Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Berbasis Digital
Dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Berusaha Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik**

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

COACH

MENTOR

Ditandatangani secara
elektronik

Fauzimar, A.Ptnh., S.H., M.H
NIP. 19640606 198503 1 007

Kamaruddin, S.H., M.H
NIP. 19680311 199403 1 006



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan yang disusun dan diseminarkan guna memenuhi persyaratan dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2023.

Dalam Aksi Perubahan ini penulis mengambil judul **“Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Berbasis Digital Dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik”**

Peningkatan pelayanan, melalui pengelolaan data pertanahan berbasis digital merupakan upaya yang dilakukan untuk kinerja organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menuju ATR/BPN berstandar dunia dan ini merupakan upaya inovatif yang akan mendorong percepatan layanan pemerintah di bidang pertanahan, yang pada akhirnya akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kemudahan berusaha di Kabupaten Gresik.

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Marsekal TNI Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P., Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas segala arahan, bimbingan dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023.
2. Bapak Ir. H. Jonahar, M. Ec., Dev., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku Mentor Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini
3. Bapak Deni Santo, ST., M.Sc., Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku penguji Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
4. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional sekaligus sebagai Narasumber pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atas segala arahan dan bimbingan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023.

5. Bapak Ir.H. Jonahar M.Ec.Dev. Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Timur atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
6. Bapak Dr. Asep Heri., S.H.,M.H.,QRMP. Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Sulawesi Tenggara atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
7. Bapak Kamaruddin S.H.,M.H Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
8. Bapak Fauzimar.,A.Ptnh.,S.H.,M.H, Widyaiswara Ahli Utama pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sekaligus sebagai Pembimbing (Coach) Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 atas semua arahan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyusun Laporan Aksi Perubahan ini.
9. Para Widyaiswara sebagai Narasumber yang telah memberikan materi selama Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atas semua materi, arahan, bimbingan dan pengalaman yang diberikan selama pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023.
10. Semua Peserta dan Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 atas semua dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Seluruh Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik atas dukungan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.
12. Segenap keluarga besar, Istri tercinta, Putra/Putri tersayang (Faiz Irsyad Abdillah.Ghozy Irham Ubaidillah dan Haziq Rayhan Khoirulloh. Ibu dan Bapak yang tiada lelah mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023.

Semoga arahan, bimbingan dan dukungan dari Bapak/Ibu semua sangat bermanfaat bagi penulis dalam pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, serta merupakan amal ibadah, dan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunannya, karena itu penulis sangat berterima kasih untuk saran dan masukan untuk perbaikan Aksi Perubahan ini, dan semoga Aksi Perubahan ini bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi peningkatan Kinerja Organisasi menuju layanan administrasi pertanahan berkelas dunia.

Gresik, 06 Agustus 2023

Penulis,

Rangga Alfiandri Hasim., S.ST., M.H

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I	10
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN.....	10
A. Latar Belakang	10
B. Tujuan Aksi Perubahan.....	12
C. Manfaat Aksi Perubahan.....	12
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan	13
E. Gagasan / Terbosan Inovatif.....	13
F. Tahapan Kegiatan	15
G. Tim Efektif / <i>Stake holder</i>	18
H. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan	20
I. Rencana Pengembangan Diri.....	21
J. Profil Kompetensi.....	22
BAB II.....	23
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN	23
A. Membangun Integritas	23
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)	24
C. Pengelolaan Tim	25
BAB III	27
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN	27
A. Capaian Dalam Perbaikan.....	27
1. Tersistemnya alur pelayanan PTP berbasis digital.....	27
2. Terbentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SOP pelayanan PTP berbasis digital;	28
3. Implementasi dan mengetahui hambatan, kendala dan masalah (HKM) Pelayanan PTP berbasis digital.....	30
4. Mempercepat penyelesaian layanan PTP dan berkualitas	32

5.	Melaksanakan layanan <i>paperless</i>	32
B.	Manfaat Aksi Perubahan	33
C.	Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan	35
BAB IV	37
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN	37
A.	Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGGI)	37
B.	Undang-Undang Cipta Kerja	38
C.	Manajemen Pemerintah	39
BAB V	40
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN	40
A.	Penerapan Strategi Komunikasi	40
1.	Sosialisasi <i>Stake Holder</i> Terkait	40
2.	Sosial Media	40
3.	Loket Layanan	41
B.	Keberhasilan Mendapat dukungan adopsi / replikasi aksi Perubahan	42
1.	Internal	42
2.	Eksternal	43
BAB VI	44
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	44
1.	Perbaiki Layanan PTP Berbasis Digital mendukung sistem investasi daerah	44
2.	Terbangun ekosistem digital dalam layanan PTP	44
3.	Menjadi layanan unggulan di bidang pertanahan	44
BAB VII	45
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI	45
BAB VIII	47
PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahapan Kegiatan Jangka Pendek	15
Tabel 2 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah	17
Tabel 3 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang	18
Tabel 4 Tugas Tim Pelaksana Aksi Perubahan	19
Tabel 5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi	20
Tabel 6 Profil Potensi	22
Tabel 7 Skema diatas alur penyelesaian berkas permohonan.....	30
Tabel 8 Opname berkas KKPR Berusaha yang belum dikirim Ke Kantah.....	31
Tabel 9 Kondisi Berkas layanan PTP di Kantah	34
Tabel 10 Monitoring berkas setelah kegiatan aksi perubahan.....	42
Tabel 11 Pelaksanaan pengembangan potensi diri	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pohon Masalah Pelayanan KKPR Berusaha	13
Gambar 2 Ruang Command Center Kantor Pertanahan Kab.Gresik	15
Gambar 3 Struktur Tim Efektif	20
Gambar 4 Profil Kompetensi Teknis dan Profil Potensi	21
Gambar 5 Diagram profil Potensi.....	22
Gambar 6 Coffe Morning wadah membangun integritas layanan kantah.....	23
Gambar 7 Sosialisasi Pertanahan bersama Dinas PUTR terkait layanan PKKPR	24
Gambar 8 <i>Graphical User Interface</i> (GUI) Aplikasi Go Putar	24
Gambar 9 <i>Graphical User Interface</i> (GUI) Aplikasi SI PETE	25
Gambar 10 <i>Graphical User Interface</i> (GUI) Aplikasi OSS-RBA	25
Gambar 11 Rapat Monev Tim Internal Layanan PTP.....	26
Gambar 12 Penguatan Tim eksternal dalam kegiatan Monitoring KKPR	26
Gambar 13 Alur Layanan SIMETRIS	27
Gambar 14 skema layanan PTP Kegiatan SIMETRIS	29
Gambar 15 Monitoring Evaluasi Berkas PTP dengan SIMETRIS	32
Gambar 16 <i>Paperless</i> Surat Undangan dan Tugas Peninjauan Lapangan.....	33
Gambar 17 <i>Paperless</i> Surat Permohonan dan Pengantar Pendaftaran PTP	33
Gambar 18 Mentoring dengan Pejabat Fungsional penata ruang muda di Dirjen Tata Ruang	35
Gambar 19 Mentoring dengan Analis Penatagunaan tanah di Dirjen Penataan Agraria.....	36
Gambar 20 Sosialisasi SIMETRIS dan Si PETE dalam acara monitoring KKPR	40
Gambar 21 Publikasi di Sosial Media Untuk mendesiminasi kegiatan perubahan tersebut.	41
Gambar 22 <i>Flyer</i> terkait peningkatan pelayanan PTP.....	41
Gambar 23 FGD Kantah P2, Dinaas PUTR dan Direkstorat Sinkronisasi Ruang	43
Gambar 24 3K Bersama Pemkab dan Kantah Kab.Gresik.....	43
Gambar 25 Bimtek KKPR Kanwil BPN Prop.Jawa Timur.....	46

BAB I

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A. Latar Belakang

Ease Of Doing Business (Eodb) / Kemudahan berinvestasi di Indonesia berada di rangking 73 pada akhir tahun 2019 yang di release oleh Bank Dunia (World Bank). Salah satu parameter dalam penilaian tersebut ialah kemudahan dalam perijinan usaha pada suatu negara baik waktu dan persyaratannya. Perijinan usaha menjadi perhatian dikarenakan Indonesia membutuhkan dana investasi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya setelah badai COVID-19 melanda dunia. Agenda besar adalah segera memulihkan perekonomian dengan memberikan akselerasi dalam memberikan kemudahan bagi investor untuk berusaha.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UUCK) terutama aturan mengenai perizinan dasar yang salah satunya adalah kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk berusaha maupun non berusaha yang wajib dimiliki oleh perorangan / badan usaha sebelum melakukan kegiatan usaha atau non usaha di ruang yang dimiliki / dikuasai. UUCK menjadi omnibus law yang diharapkan bisa menarik investasi ke negara ini dengan memberikan peluang yang besar dan kemudahan dalam perijinan untuk berusaha. Peraturan turunan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

KKPR untuk kegiatan berusaha yang terfasilitasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) memudahkan investor dalam melakukan pengurusan perijinanya. Sistem digital yang bisa diakses dimana saja oleh pengusaha dengan berbasis web yang dikembangkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) serta Investor bisa memonitor permohonannya. Layanan KKPR untuk berusaha yang secara regulasinya bisa diselesaikan dalam waktu 30 Hari kerja namun untuk saat ini berdasar data dari Geographic Information Sistem Tata Ruang (Gistaru) untuk kegiatan berusaha di Kabupaten Gresik rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 91 Hari (https://tataruang.atrbpn.go.id/oss_kkpr2/persetujuan-kkpr yang diakses tanggal 22 Mei 2023). Banyak faktor yang menyebabkan keterlambatan mulai dari pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Pemohon sesuai dengan

Surat Perintah Setor (SPS) oleh Pemohon, Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) oleh institusi penataan ruang daerah yang dikomandoi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan finalisasi produk KKPR oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP).

Kegiatan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan merupakan pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan tanah yang meliputi ketentuan dan syarat penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan tanah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang, sifat dan jenis hak, kemampuan tanah, ketersediaan tanah serta kondisi permasalahan pertanahan sesuai dengan Permen ATR BPN No. 12 tahun 2021 tentang tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan. Waktu penyelesaian pelayanan PTP dalam penerbitan KKPR ialah 10 Hari kerja namun berdasarkan data komputerisasi kantor pertanahan (kkp) untuk pelayanan PTP di kantor Pertanahan Kabupaten Gresik rata-rata diselesaikan dalam waktu 39 hari.

Pelayanan prima dapat terwujud khususnya dalam pelayanan PTP Apabila pelaksana dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) memiliki jiwa Pancasila yang beretika dan berintegritas yang tercermin dalam nilai-nilai dasar (*Core Values*) ASN **Berakhlak** (**B**erorientasi pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**daptif, **K**olaboratif). *Core Values* akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter yang professional. Berkaitan dengan layanan public seorang pejabat pengawas harus bisa memastikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat mengutamakan kepuasan masyarakat, melakukan perbaikan terus menerus sehingga memberikan layanan yang baik yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas tanpa membeda-bedakan pelayanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PAN dan RB) telah mencanangkan Kebijakan Manajemen ASN Menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan dapat terbentuk Birokrasi berkelas Dunia. Pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN, yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, *hospitality, networking*, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan *entrepreneurship*. Seorang ASN yang 'Smart' juga diharapkan dapat berperan

sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia.

Pelayanan PTP yang cepat, akurat dan efisien tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi oleh ASN. Terkait hal tersebut maka dapat dilakukan optimalisasi pelayanan PTP secara digital dengan menggunakan teknologi yang sekarang ada untuk memperbaiki kondisi yang sekarang ada sehingga terbangunlah layanan yang berstandart dunia. Maka perlu adanya rencana aksi perubahan yang dirancang yaitu **“Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Berbasis Digital Dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik”**.

B. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan yang diharapkan dari aksi perubahan ini untuk peningkatan pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yaitu:

- a. Tersistemnya alur pelayanan PTP berbasis digital kedalam Sistem Manajemen Pertimbangan Teknis Pertanahan (SIMETRIS);
- b. Terbentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SOP pelayanan PTP berbasis digital;
- c. Implementasi dan mengetahui hambatan, kendala dan masalah (HKM) Pelayanan PTP berbasis digital;
- d. Sosialisasi, bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e. Mempercepat penyelesaian layanan PTP dan berkualitas;serta
- f. Pelaksanaan layanan paperless menuju ATR/BPN berstandart dunia.

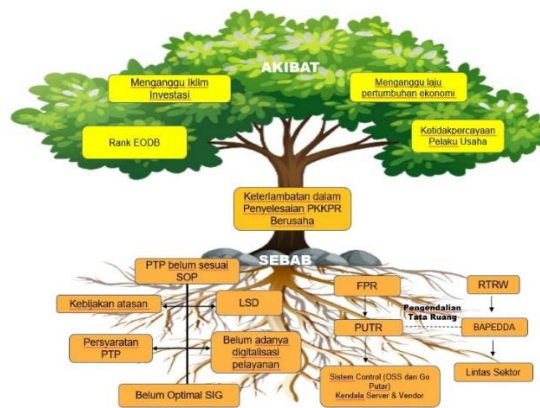
C. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat bagi lembaga:
 - a. Terwujudnya pelayanan PTP menjadi transparan, cepat, tepat, realtime, akurat, mudah dan murah menuju kantor modern/ paperless;
 - b. Terwujudnya data PTP yang terintegrasi; dan
 - c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dengan baik.
2. Manfaat bagi masyarakat:

- a. Pelayanan PTP secara digital menjadi transparan, cepat, tepat, real time, akurat, mudah dan murah; dan
 - b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas masyarakat datang ke loket Kantor Pertanahan.
3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
- a. Mempercepat pelayanan KKPR untuk kegiatan Berusaha; dan
 - b. Mempermudah koordinasi dan terintegrasi data dalam pengambilan keputusan KKPR untuk kegiatan berusaha.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Pelayanan KKPR berusaha yang terintegrasi dalam satu sistem *OSS (online Single Submission)* di kabupaten Gresik melibatkan *Stake Holder* terkait antara lain dari pihak Pemkab yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan dalam penyelesaian KKPR diakibatkan beberapa faktor antara lain *RTRW* revisi dan *RDTR*, *LSD (Lahan Sawah Dilindungi)*, *Forum Penataan Ruang (FPR)*, *Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP)*. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam gambar dibawah ini



Gambar 1 Pohon Masalah Pelayanan KKPR Berusaha

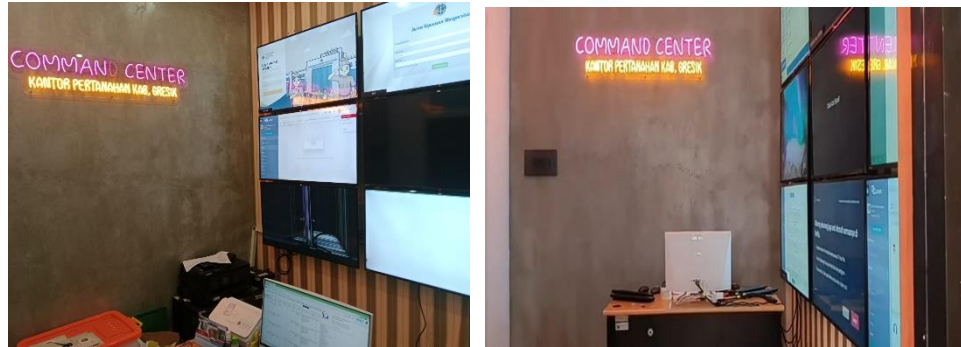
E. Gagasan / Terbosan Inovatif

Sesuai dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN adalah melayani, profesional dan terpercaya, serta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tanggal 6-9 Maret 2023 dengan tema “*Peningkatan Investasi melalui Transformasi Digital dan*

Kepastian Hukum di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan” maka inovasi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan layanan PTP berbasis digital sebagai berikut:

1. SIMETRIS (Sistem Manajemen Pertimbangan Teknis Pertanahan) Berbasis Digital merupakan sistem manajemen pertimbangan teknis pertanahan berbasis digital yang mengelola permohonan PTP dari mulai proses pendaftaran di loket di DPMPTSP maupun loket Kantor pertanahan, proses pengolahan, sampai dengan proses penyerahan hasil. Sistem tersebut menggunakan teknologi digital seperti Cloud Storage, Arcgis Online, dan Google spreadsheet. Sistem tersebut merubah pola penyerahan berkas pendaftaran pemohon secara manual yang selama ini dilakukan ke loket Kantor pertanahan dengan melibatkan loket DPMPTSP serta tim pelaksana PTP di Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Proses SIMETRIS dapat terlihat dari tabel dibawah ini.
2. SI PETE (Sistem Informasi Pertimbangan Teknis Pertanahan)
Dalam Rakernas 2023 terdapat rekomendasi dari pusat untuk Mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pada proses peninjauan lapangan untuk PTP dan penilaian KKPR sehingga dalam aksi perubahan ini menggunakan aplikasi *Arcgis Online* dengan link <https://storymaps.arcgis.com/stories/0cb364142a6e44079c5f1207abbb536> digunakan oleh petugas survey lapang untuk mengidentifikasi dan menganalisa kondisi lapang yang di sebut SI PETE. Sistem informasi ini merupakan *database* spasial PTP yang telah terbit sejak 2011 sampai dengan sekarang. Sistem ini juga bisa di akses oleh masyarakat dan *stake Holder* terkait.
3. *Command Center Terpadu* (CCT)
Instansi pelayanan wajib memiliki saluran komunikasi dengan pengguna layanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan social media. Hal tersebut menjamin keterbukaan atas layanan yang dimiliki supaya apabila ada kendala dan masalah untuk dapat segera diatasi. Layanan aduan yang diadopsi pada kegiatan studi lapang pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur yaitu JAQIR (Jakarta *Quick Response*) selain sebagai *Hotline* aduan layanan juga sebagai media komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan Kantor Pertanahan Jakarta Timur. Penerapan di Kantor Pertanahan Kab. Gresik yang sudah terdapat *Command Center* bisa ditingkatkan fungsinya menjadi media komunikasi dengan pemohon PTP baik dalam pengiriman surat

pemberitahuan, surat undangan, dan informasi kekurangan berkas. Maka dari itu disebut dengan *Command Center* Terpadu (CCT) yang tidak aja melayani pengaduan saja. Berikut gambar kondisi *Command Center* yang tersedia.



Gambar 2 Ruang Command Center Kantor Pertanahan Kab.Gresik

CCT bertujuan mengurangi kesenjangan data permohonan di sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dengan posisi berkas sebenarnya di pelaksana, serta menjadi alat komunikasi terpusat melalui saluran media social yang ada baik *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* dan lainnya. Sehingga pemohon PTP yang biasanya mengecek status permohonannya melalui aplikasi sentuh tanahku dan OSS bisa langsung melakukan konfirmasi melalui CCT.

F. Tahapan Kegiatan

1. Jangka Pendek

Tabel 1 Tahapan Kegiatan Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Waktu (Bulan)												Output/ Eviden	Biaya	Keterangan		
		Mei				Juni				Juli								
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV							
A	Tahapan Aksi Perubahan																	
1	Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor & Coach															Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 0,-	
2	Rapat Koordinasi dan Pembentukan tim SIMETRIS															Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 500.000,-	konsumsi

	3	Rapat penyusunan kertas kerja, jadwal kegiatan SIMETRIS									Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 500.000,-	konsumsi
	4	Sosialisasi Aksi Perubahan kepada seluruh pegawai, pihak ketiga & stakeholder									Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi Sosialisasi	Rp. 1.500.000,-	konsumsi
	5	Bintek dan pendampingan tim SIMETRIS dan CCT									Undangan, Daftar hadir pelatihan dan Piagam	Rp. 1.000.000,-	konsumsi
	6	Rapat Koordinasi dengan <i>Stake Holder</i> Terkait.									Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi	Rp. 500.000,-	konsumsi
	7	Rapat Pembahasan Tahapan, Strategi dan waktu pelaksanaan									Undangan, Notulen, Daftar Hadir, <i>Schedule</i>	Rp. 500.000,-	konsumsi
	8	Pendampingan TIM SIMETRIS di Loker layanan DPMPTSP									Brosur, Pamflet layanan PTP Digital	Rp.1. 500.000,-	Bahan
B Tahapan Implementasi Aksi Perubahan													
	1	Pelaksanaan SIMETRIS berbasis digital									Melakukan Pelayanan PTP untuk KKPR Berusaha	Rp.0-	
	2	Monitoring Pelaksanaan TIM SIMETRIS									<i>Data Base</i> Kartu Kendali pelaksanaan	Rp.500.000,-	penjilidan, Fotocopy, ATK
C Tahap Monitoring dan Evaluasi													
	1	Rapat monitoring dan evaluasi									Undangan, Daftar hadir, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp.500.000,-	konsumsi

2	Laporan Monitoring dan Evaluasi							Laporan	Rp. 500.000,-	penjilidan, Fotocopy, ATK
Total dana yang dibutuhkan pada tujuan jangka pendek I									Rp..8.000.000,-	

2. Jangka Menengah

Tabel 2 Tahapan Kegiatan Jangka Menengah

No	Kegiatan	Waktu	Output/ Eviden	Biaya	Keterangan
A Tahapan Rencana Aksi Perubahan					
1	Rapat Koordinasi dengan Pemda	1 Oktober 2023	Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 1.000.000,-	Konsumsi
2	Penyediaan anggaran pembaharuan sarana dan prasarana	28 Oktober 2023	Dokumen rencana anggaran	Rp. 15.000.000,-	Sumber pembiayaan Pihak ketiga
B Tahapan Implementasi Aksi Perubahan					
1	Pelaksanaan SIMETRIS berbasis aplikasi yang berkelanjutan tersinkron dengan Pusdatin	28 Oktober 2023 s/d 10 Desember 2023	Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp.0,-	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Pembiayaan dari APBN • Sumber Pembiayaan dari CSR Perusahaan
2	Implementasi PTP untuk seluruh kegiatan layanan	10 November 2023	Laporan data terintegrasi	Rp. 0,-	
C Tahap Monitoring dan Evaluasi					
1	Rapat monitoring dan evaluasi.	13 November 2023	Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp.500.000,-	Konsumsi
2	Laporan Monitoring dan Evaluasi	30 November 2023	Laporan data terintegrasi	Rp.1.000.000,-	penjilidan, Fotocopy, ATK

Total dana yang dibutuhkan pada tujuan jangka menengah II	Rp1.500.000,--
---	----------------

3. Jangka Panjang

Tabel 3 Tahapan Kegiatan Jangka Panjang

No	Kegiatan	Waktu	Output/ Eviden	Biaya	Keterangan
A	Tahapan Rencana Aksi Perubahan				
1	Rapat Koordinasi dan Persiapan	25 Januari 2021	Undangan, Notulen, Dokumentasi Rapat	Rp. 1.000.000,-	Konsumsi
B	Tahapan Implementasi Aksi Perubahan				
1	<i>Launching Layanan SIMETRIS dan SI PETE</i>	Agustus s/d November 2021	Dokumentasi dan laporan	Rp.5.000.000,-	<i>Pembiayaan diusulkan DIPA 2021 atau CSR Perusahaan</i>
C	Tahap Monitoring dan Evaluasi				
1	Rapat monitoring dan evaluasi	21 Desember 2021	Laporan data terintegrasi	Rp.500.000,-	Konsumsi
2	Laporan Monitoring dan Evaluasi	28 Desember 2021	Laporan data terintegrasi	Rp.500.000,-	penjilidan, Fotocopy, ATK
Total dana yang dibutuhkan pada tujuan jangka panjang III				Rp.7.000.000,-	
Total I + II + III				Rp. 16.500.000,-	

G. Tim Efektif / Stake holder

Penyusunan tim kerja untuk mencapai tujuan Aksi Perubahan direncanakan penyusunan Tim Pengarah, Pelaksana, Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut:

1. Tim Pengarah mengarahkan, membimbing dan memberi bahan-bahan yang menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;

- b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- d. Fauzimar, A.Ptnh.,S.H.,M.H, Widyaiswara Ahli Utama pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kementerian ATR/BPN (Coach).

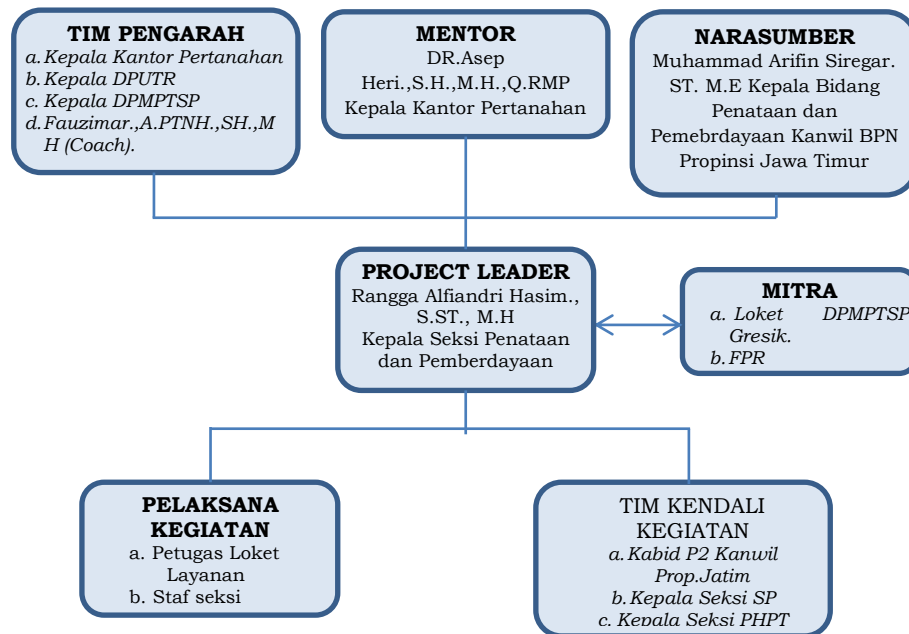
2. Tim Pelaksana :

Tabel 4 Tugas Tim Pelaksana Aksi Perubahan

No.	Jabatan	Tugas
1	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Bertanggung jawab terhadap layanan pertimbangan teknis pertanahan di Kantor Pertanahan .
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Membantu penyusunan rencana anggaran, adminitrasi kegiatan dan pelaksanaan layanan CCT.
3	Penata Pertanahan Pertama Substansi Pentagunaan tanah	Koordinator pelaksanaan layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Kantor pertanahan.
4	Staf Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Melaksanakan kegiatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
5	Petugas loket layanan	Melakukan penerimaan berkas dan memberikan layanan konsultasi kepada pemohon layanan PTP
6	Admin Command Center	Menerima aduan dan layanan informasi terkait PTP (CCT)
7	Pembantu umum	Mendukung terhadap kelancaran kegiatan.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi:

- a. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur;
- b. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik;
- c. Kepala Seksi Penegasan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik; dan
- d. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.



Gambar 3 Struktur Tim Efektif

H. Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Dalam kegiatan aksi perubahan ini diharapkan muncul kompetensi baru yang harus dimiliki oleh siapapun yang terdampak dalam inovasi ini. Hal tersebut dijalankan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaksana internal maupun Stake holders terkait dalam aksi perubahan.

Rencan Strategi Pengembangan Kompetensi dapat terlihat dari table dibawah ini:

Tabel 5 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi

No	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)
	Internal		
1	Kepala Seksi dan Koorsub	<i>Mindset</i> melayani kepuasan masyarakat prioritas utama	Non Klasikal : Bintek Kepala Kantor dan komitmen Bersama
2	Petugas Locket	Pelayanan Digital	Klasikal : Bintek Kasubag TU dan Kepala Seksi
3	Petugas Pelaksana seksi P2	Pemahaman SOP pelayanan PTP, Melek digital	Non Klasikal : Bintek Kepala seksi P2
4	Admin <i>Command Center</i>	Pemahaman SOP layanan aduan	Non Klasikal : Bintek kasubag TU
	Eksternal		

1	DPMPTSP/DPUTR	PTP digital	Non Klasikal : Sosialisasi , Pamflet dan <i>Banner</i>
2	Asosiasi Pengusaha (REI/ HIMPER)	PTP Digital	Non klasikal : sosialisasi

I. Rencana Pengembangan Diri

Berdasarkan hasil pemetaan kompetensi yang diselenggarakan oleh PPSDM Kementerian ATR/BPN pada tahun 2022, yang dapat dilihat di website sipk.atrbpn.go.id maka dapat dilihat seperti gambar di bawah ini. Hal tersebut bertujuan untuk pengembangan yang dibutuhkan dalam pengembangan potensi diri dan teknis.

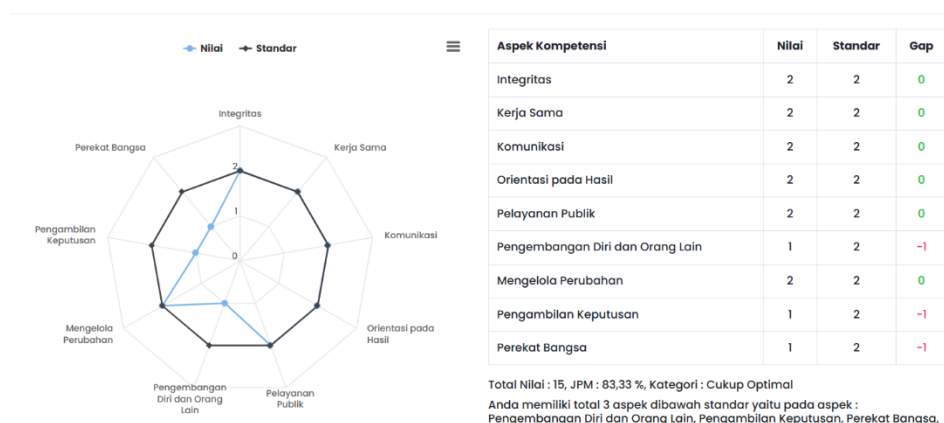


Gambar 4 Profil Kompetensi Teknis dan Profil Potensi

Berdasarkan gambar tersebut hal – hal yang perlu ditingkatkan pada kompetensi teknis adalah bidang penataan ruang. Sedangkan, potensi diri yang perlu ditingkatkan adalah inisiatif, dorongan berprestasi dan stabilitas emosi.

J. Profil Kompetensi

Berdasarkan data di sipk.atrbpn.go.id dapat dilihat terkait dengan profil kompetensi pada diri. Hasil dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang menerangkan bahwa termasuk Kategori cukup optimal dengan JPM: 83,33% dan ada aspek yang dibawah standart yang perlu dikembangkan yaitu Pengembangan Diri dan Orang lain, Pengambilan Keputusan dan Perekat bangsa.



Gambar 5 Diagram profil Potensi

Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi Perubahan	Sumber Pembelajaran
Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis	Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGGI)	Self Learning	PKKPR	Literasi Peraturan, Modul dan Internet
Pertanahan Berbasis Digital Dalam Penerbitan	UU Cipta Kerja (KEMENKO)	Self Learning	PKKPR	Literasi Peraturan, Modul dan Internet
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha	Manajemen Pemerintah (KEMENDAGRI)	Self Learning	SIMETRIS	Literasi Peraturan, Modul dan Internet

Tabel 6 profil Potensi

BAB II

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A. Membangun Integritas

Pembangunan integritas layanan yang berorientasi kepada hasil dengan mengutamakan layanan yang baik kepada masyarakat yang terbebas dari unsur – unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi indikator utama keberhasilan Kantor Pertanahan melayani di bidang Pertanahan khususnya di Seksi Penataan dan Pemberdayaan yang melayani terkait PTP untuk mendukung layanan KKPR Berusaha. Hal yang pertama dilakukan adalah Pembangunan komitmen melayani Bersama seluruh Seksi di Kantor Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan melakukan *Coffe Morning* sebagai sarana untuk memonitoring dan evaluasi layanan sebagai komitmen melayani yang dilaksanakan setiap senin setiap minggu.



Gambar 6 *Coffe Morning* wadah membangun integritas layanan kantah

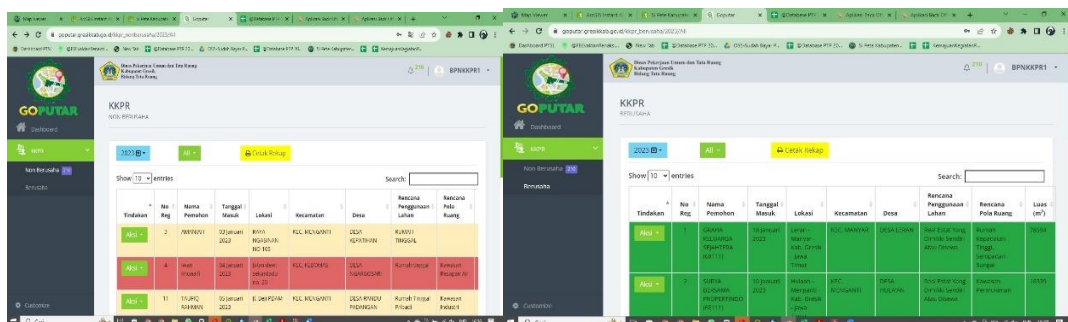
Pembangunan integritas terhadap layanan PTP untuk KKPR juga dilakukan dengan pihak eksternal sebagai *Stake holder* yang memiliki kewenangan dalam KKPR yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik (Dinas PUTR) maupun PPAT/Notaris serta dinas terkait. Hal tersebut dilakukan diawal kegiatan aksi perubahan untuk menjabarkan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dalam aksi perubahan.



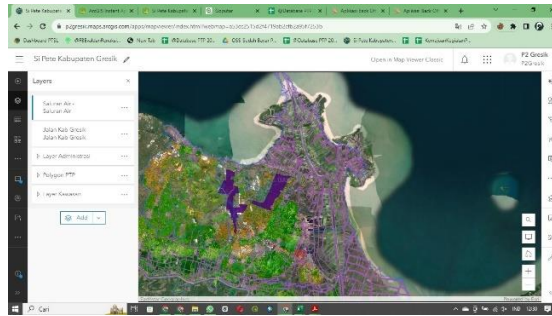
Gambar 7 Sosialisasi Pertanahan bersama Dinas PUTR terkait layanan PKKPR

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)

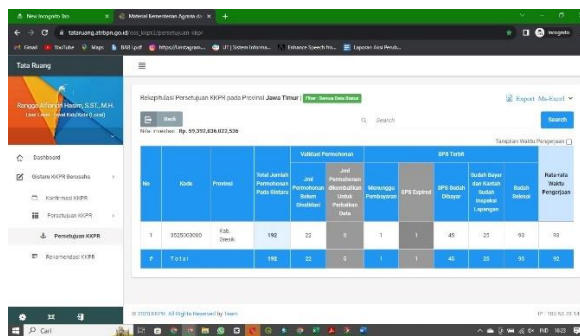
Perkembangan zaman yang sangat pesat dalam penggunaan TI dalam aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pelayanan pertanahan untuk melayani masyarakat. Teknologi Informasi yang sudah dikembangkan untuk layanan KKPR oleh institusi pusat seperti Aplikasi OSS-RBA, GISTARU, dan KKP. Sedangkan di kabupaten Gresik dikembangkan aplikasi GO Putar untuk memfasilitasi penerbitan KKPR namun hal tersebut belum di dukung dengan pengembangan TI di Kantor Pertanahan khususnya layanan PTP untuk kegiatan KKPR. Dalam Aksi Perubahan ini kami mengmbangkan aplikasi SIMETRIS dan SI PETE untuk membantu penerbitan KKPR dan Mensinkronisasikan data PTP dengan Go Putar.



Gambar 8 Graphical User Interface (GUI) Aplikasi Go Putar



Gambar 9 *Graphical User Interface (GUI) Aplikasi SI PETE*



Gambar 10 *Graphical User Interface (GUI) Aplikasi OSS-RBA*

Dalam aksi perubahan ini menggunakan ketiga aplikasi utama dengan bantuan aplikasi SI PETE serta SIMETRIS dengan menggunakan *Cloud Storage* serta *Google Sheet* dalam monitoring kegiatan PTP.

C. Pengelolaan Tim

Pelaksanaan aksi perubahan melibatkan Tim internal Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kab. Gresik baik staf maupun pejabat fungsional serta melibatkan loket layanan pertanahan dan staf pengelola aduan. Tim eksternal yang dilibatkan adalah dinas PUTR kabupaten Gresik sebagai pemilik kewenangan dalam kegiatan KKPR.

Pengelolaan Tim Internal meliputi Petugas pengolah data PTP dan pejabat fungsional pelaksana PTP untuk memperbaiki kinerja baik secara teknik maupun *knowledge*. Membahas strategi apa yang mungkin dilakukan agar terpenuhinya deadline pengerjaan yang sesuai dan tepat waktu tanpa ada masalah ataupun keterlambatan. Hasil rapat monev akan dilaporkan HKM pelaksanaan dalam kegiatan *Cofee Morning* Kepala Kantor Pertanahan untuk mendapatkan solusi terbaik.



Gambar 11 Rapat Money Tim Internal Layanan PTP

Pengelolaan Tim eksternal dilakukan dalam kegiatan Monitoring KKPR yang merupakan kegiatan terintegrasi dengan kegiatan penerbitan KKPR. Dalam Hal ini anggaran untuk kegiatan tersebut diatur dalam DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (6908. Sinkronisasi Pemanfaatan ruang) dengan nilai anggaran Rp.356.160.000,-



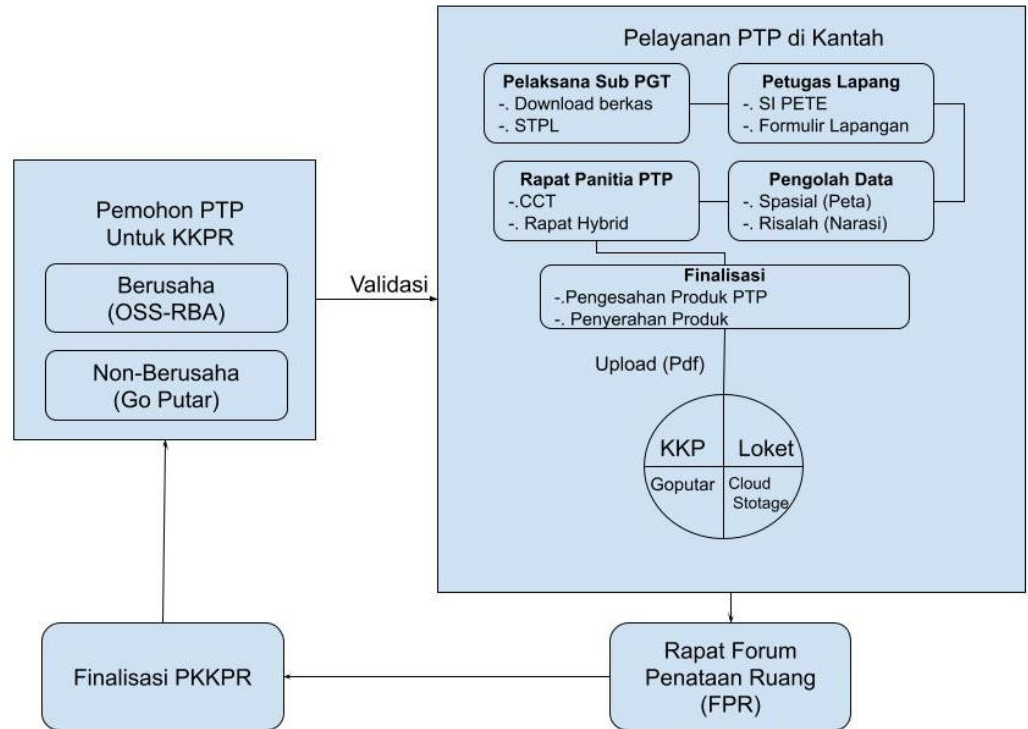
Gambar 12 Penguatan Tim eksternal dalam kegiatan Monitoring KKPR

BAB III

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A. Capaian Dalam Perbaikan

1. Tersistemnya alur pelayanan PTP berbasis digital



Gambar 13 Alur Layanan SIMETRIS

Konfirmasi KKPR (K-KKPR) Diproses oleh Sistem OSS-RBA Terbit dalam 1 hari kerja. Jika daerah di lokasi usaha telah memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA, maka diterbitkan Konfirmasi KKPR. Persetujuan KKPR (P-KKPR) Memerlukan analisis dan penilaian dokumen Terbit dalam 20 hari kerja. Jika daerah di lokasi usaha belum memiliki RDTR yang telah terintegrasi dalam Sistem OSS-RBA, maka dilakukan analisis dan penilaian dengan mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang lainnya dengan asas berjenjang dan komplementer untuk penerbitan Persetujuan KKPR. Rekomendasi KKPR (R-KKPR) Memerlukan analisis dan penilaian dokumen Terbit dalam 20 hari kerja. Jika kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak termuat di dalam dokumen Rencana Tata Ruang, maka diterbitkan Rekomendasi KKPR. Pada proses pelayanan PTP di Kantah pertama kali berkas permohonan akan langsung diserahkan kepada Substansi Penatagunaan Tanah (PGT) yang akan mendownload membuat Surat Tugas Peninjauan Lapang (STPL). Setelah adanya Surat Tugas Peninjauan Lapang (STPL), berkas akan

langsung diserahkan kepada Petugas peninjau lapang agar sesegera mungkin dilakukan peninjauan lapang ke tanah yang dimohon. Pada proses ini, petugas lapang menggunakan *Aplikasi SIPETE* yang dapat menunjang percepatan proses pengerjaan berkas. Sesudah dilakukan peninjauan lapang, petugas survey langsung menyerahkan berkas pada petugas olah data spasial (Peta) dan petugas olah data Risalah (Narasi) agar segera terbit produk Permohonan Teknis Pertanahan (PTP) dan dilakukan rapat panitia PTP (Rapat Hybrid). Pada tahap akhir dilakukan Finalisasi yaitu pengesahan produk Permohonan Teknis Pertanahan (PTP) dan penyerahan produk. Jika produk Permohonan Teknis Pertanahan (PTP) telah siap untuk diserahkan dilakukan upload .pdf ke sistem GO-Putar dan Locket penyerahan sehingga dapat dilaksanakan Rapat Forum Penataan (FPR) untuk Finalisasi KKPR.

2. Terbentuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SOP pelayanan PTP berbasis digital;

Pada pelaksanaan PTP kami menggunakan sistem bernama Simetris yang merupakan sistem manajemen pertimbangan teknis pertanahan berbasis digital yang mengelola permohonan PTP dari mulai proses pendaftaran di loket di DPMPTSP maupun loket Kantor pertanahan, proses pengolahan, sampai dengan proses penyerahan hasil. Sistem tersebut menggunakan teknologi digital seperti *Cloud Storage*, *Arcgis Online*, dan *Google spreadsheet*. Sistem tersebut merubah pola penyerahan berkas pendaftaran pemohon secara manual yang selama ini dilakukan ke loket Kantor pertanahan dengan melibatkan loket DPMPTSP serta tim pelaksana PTP di Seksi Penataan dan Pemberdayaan.



Gambar 14 skema layanan PTP Kegiatan SIMETRIS

Pada Skema diatas alur penyelesaian berkas permohonan dengan SIMETRIS yang dapat mengoptimalkan penyelesaian sesuai dengan SOP nya selama 10 Hari. Hal tersebut lebih jelasnya terlihat pada tabel dibawah ini.

	Tahapan	Waktu	Deskripsi Kegiatan	Output Kegiatan
1	Pemohon	-	Penyiapan kelengkapan berkas (digital)	Scan Dokumen
				Upload Dokumen ke <i>Cloud Storage</i>
				Konfirmasi Petugas Loker Investasi sudah mengupload berkas (Via Wa/ SMS)
2	Loker Pelayanan	1 hari	Pemeriksaan Kelengkapan digital	Surat Perintah Setor
			memverifikasi Berkas Permohonan	Surat Tanda Terima Dokumen
3	Survey Lapang (administrasi)	1 Hari	Pembuatan Surat Tugas digital	Surat Undangan dikirim secara digital ST dan Undangan yang sudah TTE Pejabat struktural
			Membuat surat undangan tinjau lapangan digital	
4	Peninjau Lapangan	1 Hari	Plotting bidang Survey yang dioverlaykan dengan RTRW	Deliniasi Bidang survey dalam bentuk file ekstensi KML.
5	Pengolah data Lapang	1 Hari	Melakukan Overlay dengan Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta RTRW	Peta Analisa pertimbangan Teknis Pertanahan
6	Pengolahan Risalah	1 Hari	Melakukan Resume terhadap Hasil Peta Analisa Spasial PTP	Draft Resume Hasil PTP
7	Rapat Tim PTP	1 Hari	Melakukan rapat dengan pemohon secara daring memaparkan draft PTP melalui <i>zoom</i>	Berita Acara Hasil PTP
8	Pengesahan PTP	1 Hari	Penandatanganan PTP	Dokumen PTP yang telah disahkan
9	Pengarsipan PTP	1 Hari	Scan hasil PTP	

			Upload peta hasil PTP	KKP
			Penyimpanan dalam database P2	Data base Tersimpan dalam <i>Cloud Storage</i>
10	Loket Penyerahan	1 Hari	Penyerahan Produk kepada Pemohon	Dokumen PTP

Tabel 7 Skema diatas alur penyelesaian berkas permohonan

Dalam peningkatan proses percepatan KKPR Berusaha, untuk Mendorong pemanfaatan teknologi percepatan pada proses peninjauan lapang pada permohonan PTP dan penilaian KKPR Berusaha kami menggunakan Aplikasi SIPETE. Pada proses aksi perubahan ini kami menggunakan aplikasi Arcgis Online dengan link <https://arcg.is/LDqe4> digunakan oleh petugas survey lapang untuk mengidentifikasi dan menganalisa kondisi lapang yang di sebut SIPETE. Sehingga sekarang penggunaan Google Earth diganti dengan aplikasi SIPETE untuk menunjang percepatan survey lapangan dalam proses peningkatan pelayanan KKPR Berusaha.

Untuk percepatan proses permohonan PTP kami melakukan rapat koordinasi dan sosialisasi rutin dengan memberikan undangan kepada Dinas-dinas terkait, Kecamatan dan Desa yang bersangkutan dalam pelaksanaan sosialisasi untuk membahas Simetris Stake Holder Terkait di FPR. Dalam pelaksanaannya dilakukan konfirmasi dan pencocokan berkas permohonan dengan Dinas PUTR juga pembahasan masalah perbedaan pemahaman antar anggota FPR dan solusi terkait FPR. Melakukan sharing session dan diskusi antar Dinas-dinas yang terkait untuk memecahkan satu-persatu keluhan dari pemohon mengenai permohonan berkas. Memberikan pemahaman kepada Kecamatan dan Desa yang terkait dalam rapat karena minimnya pengetahuan pihak Kecamatan dan Desa tentang peraturan baru yang berlaku. Sehingga percepatan proses permohonan PTP menggunakan proses berbasis digital menjadi terlaksana dengan maksimal.

3. Implementasi dan mengetahui hambatan, kendala dan masalah (HKM) Pelayanan PTP berbasis digital

Dalam implementasi aksi perubahan peningkatan layanan PTP untuk kegiatan KKPR berusaha terdapat beberapa Hambatan , Kendala dan Masalah yang ditemukan di lapangan, antara lain :

- RTRW revisi Kabupaten Gresik terlalu lama untuk di sahkan menjadi Perda sehingga tidak bisa menampung laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti

dengan regulasi yang ada karena Perda 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Gresik 2011-2030;

- Pemahaman masyarakat yang terbatas terkait PKKPR yang merupakan mekanisme layanan OSS terkait dengan perijinan dasar yang harus dimiliki. Hal tersebut dapat diketahui ketika Masyarakat melakukan permohonan KKPR yang seharusnya setelah melakukan pendaftaran melalui OSS ditindak lanjuti dengan penyerahan berkas-berkas permohonan PTP ke Kantor Pertanahan namun sering tidak dilakukan. Berdasarkan data GISTARU dan *KKP terdapat 46 berkas yang belum di serahkan peryaratan PKKPR nya ke Kantor Pertanahan sehingga belum bisa di proses ;*

	A	B	C	D	E	F
	NOMOR BERKAS	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	NIB	OSS ID	KETERANGAN
2	168366/2022	EMDEKI UTAMA	JL. RAYA KRILAN NO.294 RT.011/002, KRILAN, DRIYOREJO	9120004561117	P-202001080100536519132	
3	196254/2022	EMDEKI UTAMA	JL. RAYA KRILAN NO.294 RT.011/002, KRILAN, DRIYOREJO	9120004561117	P-202001080100536519132	
4	201136/2022	MAGNESIUM GOSARI INTERNASIONAL	JLN SEKAPUK KM 32	8120004970166	P-201912300924069632854	
5	224287/2022	MEGA GLOBAL FOOD INDUSTRY	JALAN RAYA TENARU INDUSTRI	9120001130655	P-201912302220282948073	Sudah Masuk
6	225605/2022	TIRTOBUMI ADYATUNGGA	ROXY MAS BLOK C-2 NO.35-36, JL. KH HASYIM ASH	9120106362966	P-202001080039289598989	Sudah Masuk
7	226474/2022	KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK	Jl. Jend. A. Yani Petrokimia	8120000891875	P-201912301600065718944	
8	236732/2022	KELUARGA SEJAHTERA MINERALINDO	JL DR WAHIDIN SUDIROHUSODO KOMPLEK RUKO GREEN GARDEN BLOK A2 NO.12	-	P-202210141127360286668	
9	237488/2022	SUMBER PAVUNG SEJAHTERA	DUSUN SEMBUNG	9120010080828	P-201912311345059849911	
10	238184/2022	RAYA MANYAR PERSADA	JL. JAWA NO. 8 GRESIK KOTA BARU	9120004531946	P-20191231132463862367	Sudah Masuk
11	250294/2022	SUMBER SINAR SEMESTA	JL. Alaydrus No. 84 D	8120117041261	P-201912301821011827825	
12	250910/2022	SUMBER SINAR SEMESTA	JL. Alaydrus No. 84 D	8120117041261	P-201912301821011827825	
13	261597/2022	SUMBER SINAR SEMESTA	JL. Alaydrus No. 84 D	8120117041261	P-201912301821011827825	
14	267491/2022	GRESIK MIGAS	JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO 708	220203182524	P-202001221602490096510	
15	270373/2022	NOVAL JAYA MAKMUR LAND	DUSUN NGBRETT	1811220045618	P-202211181455125771777	
16	270377/2022	ARTISAN SURYA KREASI	EASTCOAST CENTER LANTAI 5 JL. KEJAWAN PUTIH MUTIARA NOMOR 17	8120214260159	P-201912302145536431805	
17	1904/2023	ANAK JAYA BAPAK SEJAHTERA	Jalan Ratna Nomor 14	1202220022197	P-20211280301542251964	Sudah Masuk
18	4483/2023	PADU KARYA MANDIRI	JL Manukan Yoso Dalam Blok 7 I Nomor 12	1810220059683	P-202210170708431208843	
19	4483/2023	PADU KARYA MANDIRI	JL Manukan Yoso Dalam Blok 7 I Nomor 12	1810220059683	P-202210170708431208843	
20	4482/2023	PADU KARYA MANDIRI	JL Manukan Yoso Dalam Blok 7 I Nomor 12	1810220059683	P-202210170708431208843	
21	4480/2023	PADU KARYA MANDIRI	JL Manukan Yoso Dalam Blok 7 I Nomor 12	1810220059683	P-202210170708431208843	
22	13782/2023	INSAN PROPERTI MANDIRI	Jl. Blimbing No. 1	298010190652	P-2021051412085562843	Sudah Masuk
23	16626/2023	SUDIMORO SUKSES BERGAMA	MENGANTI	12290003010125	P-202103021029038819622	Sudah Masuk

Tabel 8 *Opname* berkas KKPR Berusaha yang belum dikirim Ke Kantah

Opname berkas PTP dalam sehari kerja untuk fokus ke permohonan PTP PKKPR Berusaha, dengan permohonan yang berkasnya belum dilengkapi oleh pemohon. Sehingga dapat diketahui semua berkas yang telah berstatus Bayar dari GISTARU dan yang belum melakukan setor kelengkapan berkas untuk PTP (KKP) ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Untuk mengatasi hal tersebut kita memberikan surat undangan peninjauan lapang kepada pihak pemohon agar melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk memudahkan proses peninjauan lapang yang selanjutnya akan dilakukan proses Pengerjaan PTP hingga terbit produk PTP.

- Sumber Daya Manusia yang memahami terkait dengan kegiatan PKKPR berusaha terbatas sehingga seringkali terdapat permasalahan dalam memberikan layanan PKKPR maupun PTP di Kantor Pertanahan;

- Stake holder terkait dalam penerbitan PKKPR terutama yang tergabung dalam Forum Penataan Ruang sering pasif dalam memberikan saran untuk suatu jenis kegiatan usaha;
- Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sering kali berbenturan dengan RTRW menjadikan sebuah masalah terkait penerbitan PKKPR nya;

4. Mempercepat penyelesaian layanan PTP dan berkualitas

Melayani, professional dan terpercaya merupakan jargon layanan kementerian ATR/BPN yang di pedomani dalam memberikan layanan pertanahan kepada Masyarakat. Salah satunya adalah menyelesaikan waktu sesuai SOP dan menyelesaikan tunggakan layanan dengan tetap menjamin kualitas layanan yang diberikan. Dalam mewujudkan hal tersebut maka seksi penataan dan pemberdayaan terus melakukan perbaikan salah satunya memonitoring layanan dengan menganalisa data SIMETRIS yang menggunakan https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UTS7IasyZ6rl2ua_3BGPiF5bRHRb362GtRzqOC1O7wY/edit#gid=1871188256



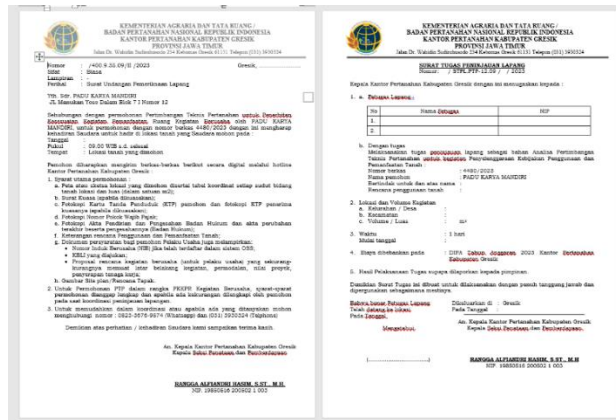
Gambar 15 Monitoring Evaluasi Berkas PTP dengan SIMETRIS

Selain tunggakan dari layanan juga dilakukan monitoring terhadap berkas yang sedang berjalan untuk mencari pemmasalahan dan solusi penyelesaiannya. Terkait kegiatan tersebut dilakukan dengan *Google Sheet* untuk menghimpun dan menganalisa dengan link <http://Bit.ly/ptpbpngresik> .

5. Melaksanakan layanan paperless

Di era Globalisasi yang semakin maju, kita dituntut memanfaatkan teknologi dengan semaksimal mungkin. Pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan

kita dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka dalam pengendalian kegiatan ini menggunakan pelaksanaan layanan *paperless* demi mewujudkan ATR/BPN berstandart dunia.



Gambar 16 *Paperless* Surat Undangan dan Tugas Peninjauan Lapangan

Selain dua surat tersebut yang sudah *paperless* terdapat surat permohonan yang terbit otomatis melalui aplikasi Go Putar yang bisa di cetak oleh pemohon untuk dibawa ke kantor Pertanahan untuk melakukan pendaftaran PTP dengan menunjukkan surat permohonan tersebut dan pengantar dari DPMPTSP Namun hal tersebut baru bisa diterpkan untuk KKPR Non Berusaha.



Gambar 17 *Paperless* Surat Permohonan dan Pengantar Pendaftaran PTP

B. Manfaat Aksi Perubahan

1. Manfaat bagi Lembaga

Manfaat dari aksi perubahan yang dilakukan selama kurang lebih 2 bulan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik terciptanya system terintegrasi dengan Dinas PUTR dalam rangka penerbitan KKPR berusaha maupun non berusaha. Karena

aplikasi Go Putar dan OSS RBA terintegrasi dengan SIMETRIS. Selain hal tersebut manfaat yang di dapat adalah transparansi layanan dikarenakan dengan SIMETRIS kita dapat mengetahui posisi berkas secara riil dan realtime. Tercatat pada tanggal 31 Juli 2023 dapat dilaporkan berkas riil yang ada dikantah sebagai berikut terlihat pada tabel dibawah ini.

KETERANGAN	JUMLAH BERKAS
PROSES	31
TIDAK ADA	46
LOKET PEMBAYARAN	58
SELESAI	4
BERKAS DITUTUP	2
MENUJU LOKET PENYERAHAN	16
MELENGKAPI BERKAS	8
PANITIA	6
Jumlah	171

Tabel 9 Kondisi Berkas layanan PTP di Kantah

Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwasanya terdapat 171 layanan PTP yang masuk di loket pendaftaran maupun loket OSS, namun berkas yang belum masuk ke BPN sejumlah 46 berkas sedangkan yang sedang berproses di seksi penataan dan pemberdayaan 61 berkas sisanya masih berada di loket. Terkait 46 berkas yang belum ada di Kantah maka kami mengirimkan surat pemberitahuan untuk segera membawa berkas kekantor pertanahan dan apabila dalam waktu 2x 10 hari kerja tidak dipenuhi maka sesuai dengan SE sekjen kementerianana ATR BPN dilakukan penutupan berkas. Hal tersebut dengan harapan bisa meningkatkan kepercayaan Masyarakat atas layanan pertanahan di Kantah Kab. Gresik.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Aksi perubahan yang dilakukan mmembantu Masyarakat untuk aware terhadap berkas yang diajukan ke Kantor Pertanahan maupun melalui DPMPTSP. Masyarakat selain bisa memonitoring berkas PTP nya melalui Sentuh tanahku, pemohon juga bisa melakukan komunikasi secara langsung melalui CCT (Command Center Terpadu) melalui media social dengan menghubungi hotline +62 823-3676-9574.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas Masyarakat meerupakan salah satu manfaat dari aksi perubahan ini karena Masyarakat dapat meng Upload berkas permohonan PTP mereka ke Cloud Storage yang disediakan oleh seksi Penataan dan Pemberdayaan dengan link s.id/up-ntp-bpngresik.

3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Manfaat dari aksi perubahan ini adalah sinkronisasi data yang cepat untuk membantu proses penilaian KKPR berusaha maupun non berusaha. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah penyelesaian kkpr berdasar GISTARU sejumlah 93 berkas yang selesai dari 192 permohonan KKPR berusaha dan sedang dalam finalisasi ada 25 berkas. Meskipun rata-rata waktu penyelesaian yang melebihi waktu namun sudah terdapat pola untuk menyelesaikan secara cepat dan profesional.

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Metode yang dilakukan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan *stakeholders* dalam menjalankan tugasnya adalah melalui pengembangan kompetensi diantaranya dengan melaksanakan mentoring dengan Direktorat sinkronisasi ruang di Direktorat Jenderal Tata Ruang membahas tentang KKPR serta Direktorat Penatagunaan Tanah di Direktorat Jenderal Penataan Agraria tentang PTP . Dengan adanya pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan dalam rencana aksi perubahan, maka pelaksanaan aksi perubahan berjalan lebih jelas dan baik.



Gambar 18 Mentoring dengan Pejabat Fungsional penata ruang muda di Dirjen Tata Ruang

Sinkronisasi dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk berusaha dan proyek strategis nasional maka perlu melakukan konsultasi teknis dengan Penata Ruang Madya di Direktorat Pemanfaatan Ruang Binda II Bersama Ibu Tessie. Kegiatan mentoring menambah wawasan terkait PKKPR yang kewenangan pusat, struktur anggaran sinkronisasi penataan ruang di Kantor Pertanahan serta Pengembangan aplikasi GISTARU untuk mendukung Aksi Perubahan ini.



Gambar 19 Mentoring dengan Analis Penatagunaan tanah di Dirjen Penataan Agraria

Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka PKKPR maka perlu konsultasi teknis dengan direktorat PGT di Dirjen Penataan Agraria Bersama D.K.Abimanyu sebagai Analis Penata Pratama di Direktor PGT terkait PTP untuk KKPR Berusaha, SOP waktu penyelesaian layanan PTP serta perubahan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga perlu dan pentingnya melakukan koordinasi dan konsultasi agar terbentuknya solusi dari segala kendala dan masalah bisa diatasi dengan mudah.

BAB IV

KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

A. Pertumbuhan Ekonomi Hijau (GGGI)

Pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pemandu yang penting dalam pembangunan ekonomi kita. Kita harus membangun perekonomian dengan bersandar pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan kata lain, kita perlu meniti pertumbuhan ekonomi yang lestari guna memenuhi prioritas Nawa Cita kita dan memberi andil pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals– SDGs) serta perjanjian iklim yang baru-baru ini disepakati dunia pada UNFCCC COP 21 di Paris.

Pembuat kebijakan di Indonesia memahami bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang bersifat multi-dimensi. Ini tercermin dalam RPJMN 2015- 2019 yang fokus pada target-target prioritas yang ditetapkan di bawah agenda Nawa Cita. Indonesia juga berkomitmen pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs) yang baru-baru ini diumumkan, yang mencakup komitmen untuk mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya. Lebih jauh lagi, Indonesia telah menyampaikan Pernyataan Niat Kontribusi Nasional (*Intended Nationally Determined Contribution– INDC*) kepada PBB untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca global. Guna mencapai target-target ini, pembuat kebijakan harus mencari cara menumbuhkan ekonomi untuk mencapai tiga pilar pembangunan berkelanjutan: pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Hal ini memerlukan upaya menyeimbangkan tujuan pertumbuhan tradisional – seperti meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi – sekaligus komitmen pada perlindungan lingkungan dan target mitigasi iklim yang signifikan. Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth) merupakan cara untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Hal ini berarti mendorong suatu pertumbuhan yang mengakui nilai modal alam, meningkatkan ketahanan, membangun ekonomi lokal yang bersifat inklusif dan adil. Konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau juga mencakup reformasi kebijakan untuk mempercepat inovasi struktural dan teknologi guna meningkatkan efisiensi sumber daya di keseluruhan perekonomian. Dalam melakukan hal ini, strategi ekonomi apapun yang berorientasi

pertumbuhan ekonomi hijau akan menekankan desain insentif kebijakan untuk melestarikan lingkungan alam dan jasa ekosistem yang dihasilkan. Singkatnya, konsep Pertumbuhan Ekonomi Hijau memadukan tujuan pemeliharaan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan banyak peluang investasi hijau yang inovatif.

Pertumbuhan ekonomi hijau diimplementasikan dengan aksi perubahan Peningkatan PTP untuk KKPR berusaha yaitu :

- Menambah wawasan dalam memberikan rekomendasi PTP untuk tetap mempertahankan azas-azas LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Selaras) dengan mempertimbangkan keberlangsungan pembangunan;
- PTP yang merupakan analisa terkait P4T maka harus dapat memfasilitasi tiga pilar dalam Pertumbuhan Ekonomi Hijau yaitu pembangunan berkelanjutan: pembangunan manusia, kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

B. Undang-Undang Cipta Kerja

Tata ruang telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, namun implementasinya masih menimbulkan kerumitan. Melalui UUCK, banyak birokrasi menyulitkan tersebut dipangkas, salah satunya terkait izin pemanfaatan ruang kini disederhanakan dengan model “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.”

Dengan konsep Omnibus Law maka UUCK diterbitkan sebagai payung hukum dari beberapa regulasi hukum yang ada untuk mempermudah investasi di negara ini. Dengan pertama kali diterbitkan UU No.11 tahun 2020 kemudian diterbitkan pengganti tanggal 31 Maret 2023 dengan UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang.

Materi pilihan terkait UUCK diimplementasikan dengan aksi perubahan Peningkatan PTP untuk KKPR berusaha yaitu :

- Menambah wawasan dalam sisi regulasi terkait dengan kemudahan berinvestasi;
- PTP sebagai pendukung dalam penerbitan KKPR selain di tuntut cepat dan berkualitas dalam menganalisa P4T sebuah rencana lokasi pemanfaatan ruang.

C. Manajemen Pemerintah

Manajemen Pemerintah secara terminologi dapat dilihat dari 2 penyusun kata yaitu Manajemen yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Menurut para ahli manajemen merupakan suatu cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Sedangkan Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya; 2 sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; 3 penguasaan suatu negara (bagian negara). Menurut Untoro Halim Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan public dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga manajemen pemerintah bertujuan untuk melayani kebutuhan Masyarakat

Materi pilihan terkait Manajemen Pemerintahan diimplementasikan dengan aksi perubahan Peningkatan PTP untuk KKPR berusaha yaitu :

- Menambah pengetahuan terkait manajemen yang baik dalam memberikan layanan PTP bagi mendukung kegiatan KKPR;
- PKKPR yang merupakan produk administrasi negara harus bisa memiliki kekuatan hukum yang tepat dan benar dengan tetap menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga PTP berkualitas maka KKPR yang di hasilkan juga berkualitas tidak cacat hukum.

BAB V

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi

1. Sosialisasi Stake Holder Terkait

Aksi perubahan terkait SIMETRIS dan Aplikasi Si PETE dilakukan sosialisasi ke *Stake Holder* terkait pada kegiatan monitoring KKPR yang terdapat anggaran nya di Kantah Kab. Gresik. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi terkait dengan alur berkas SIMETRIS yang sudah berbasis digital dan pemanfaatan SI PETE dalam rangka memvalidasi permohonan PKKPR secara spasial karena dinas PUTR sebagai validator tidak memiliki data base spasial terkait permohonan ijin lokasi dan Pemanfaatan ruang sebelum system KKPR ini di terapkan secara nasional.



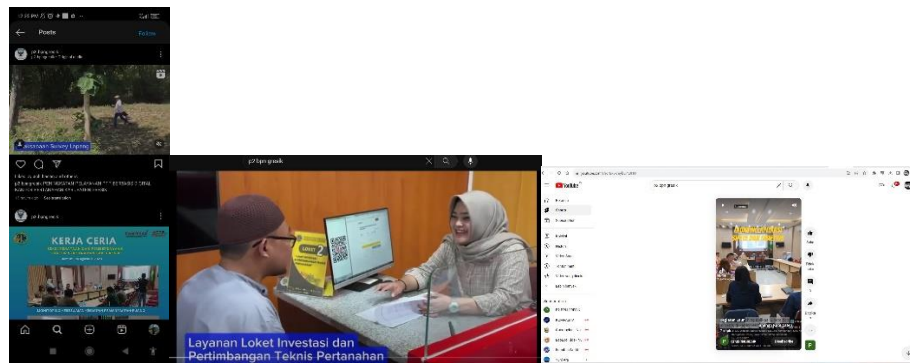
Gambar 20 Sosialisasi SIMETRIS dan Si PETE dalam acara monitoring KKPR

2. Sosial Media

Diseminasi juga dilakukan secara elektronik melalui media social Kantah Kab Gresik maupun Seksi Penataan dan pemberdayaan serta melalui *command center* yang dapat ditingkatkan fungsinya sebagai media komunikasi dengan pemohon PTP, antara lain pengiriman surat pemberitahuan, surat undangan dan informasi kekurangan dokumen. Makanya disebut Command Center Terpadu (CCT) yang tidak hanya melayani pengaduan. CCT bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara data aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di sistem dan lokasi file sebenarnya di kantor, serta menjadi alat komunikasi terpusat melalui saluran media sosial yang ada (Whatsapp, Facebook, Instagram, dll). Sehingga pelamar PTP yang biasa mengajukan status permohonan PTP melalui Aplikasi Sentuh Tanahku dan OSS bisa langsung melakukan konfirmasi melalui

CCT. Sehingga sangat penting melakukan Monitoring Evaluasi bersama petugas yang bertugas di Command Center Terpadu (CCT).

Sosialisasi layanan PTP Kantah Kabupaten Gresik dapat dilihat di video youtube dengan link https://www.youtube.com/watch?v=bI-UUqdd_24 dan dapat dilihat pada akun sosmed yang lain seperti Instagram, twitter, face book, dan tiktok.



Gambar 21 Publikasi di Sosial Media Untuk mendesiminas kegiatan perubahan tersebut.

3. Loker Layanan

Diseminasi terkait perbaikan juga dilakukan di loket layanan kantor pertanian dan di loket DPMPTSP untuk memberikan informasi kepada Masyarakat terkait digitalisasi permohonan PTP di Kantor Pertanian Kabupaten Gresik.



Gambar 22 Flyer terkait peningkatan pelayanan PTP

B. Keberhasilan Mendapat dukungan adopsi / replikasi aksi Perubahan

1. Internal

Hal – hal yang bisa di adopsi dalam lingkunga internal baik kantor pertanahan maupun kemeterian ATR/BPN. Salah satu yang bisa di replikasi oleh seksi lain yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat adalah pengawasan berkas secara real time di luar system KKP dengan menggunakan aplikasi *Google Spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh *user* dengan kendali seorang pegawai untuk mengetahui step demi step permohonan berkas masyarakat. Yang dievaluasi setiap minggu apabila ada keterlambatan dalam satu organ yang harus segera diberikan solusi penyelesaian masalahnya. Kebiasaan yang terjadi keterlambatan dikarenakan juga kurang kompetennya petugas pengolah data PTP dan kurang disiplinnya petugas dalam tata kelola penyimpanan data spasial maupun tekstual. Dalam kartu kendali tersebut yang sesuai dengan waktu penyelesaian maka ditandai dengan warna hijau apabila ada warna merah maka ada keterlambatan yang perlu diperbaiki baik secara teguran kepada pelaksana maupun memperbaiki kinerja baik secara teknik maupun *knowledge*.

No.Berkas	Atas Nama	Tanggal SPS	Tanggal Masuk P2 (Harus Selesai Surat Tugas)	Harus Selesai Gambar (Pelugas Gambar)	Harus Selesai Tekstual (Pelugas Tekstual)	Harus Selesai Koreksi 1a (Koreksi)	Harus Selesai Koreksi 1b (Koreksi)	Harus Selesai Panitia	Harus Selesai Koreksi 2 (Kas)	Naik Kepala Kantor	Keterangan
			Hari ke 1	Hari ke 2	Hari ke 3	Hari ke 4	Hari ke 5	Hari ke 6 dan 7 (dua Hari)	Hari ke 8	Hari ke 9	
11382	WIBOWO MUKTI WITIGIBO		14/03/2023	Harus 27-03-2023	Sisa 28-03-2023	29-03-2023	30-03-2023	03-04-2023	04-04-2023	05-04-2023	
11168	LIEA TAJMIDRA		14/03/2023	Harus 27-03-2023	Harus 28-03-2023	29-03-2023	30-03-2023	03-04-2023	04-04-2023	05-04-2023	
12126	ANFATUL ILMYAH		14/03/2023	Harus 27-03-2023	Harus 28-03-2023	29-03-2023	30-03-2023	03-04-2023	04-04-2023	05-04-2023	
12119	H. HARNO ST		14/03/2023	Harus 27-03-2023	Sisa 28-03-2023	29-03-2023	30-03-2023	03-04-2023	04-04-2023	05-04-2023	
13592	KASURI	21/03/2023	17/03/2023	Harus 28-03-2023	Harus 29-03-2023	30-03-2023	31-03-2023	04-04-2023	05-04-2023	06-04-2023	
12833	M. RUSLI II	15/03/2023	17/03/2023	Harus 28-03-2023	Harus 29-03-2023	30-03-2023	31-03-2023	04-04-2023	05-04-2023	06-04-2023	
15118	ISKANDAR S H S.Pd MM	28/03/2023	30/03/2023	Harus 31-03-2023	Sisa 31-03-2023	04-04-2023	05-04-2023	07-04-2023	08-04-2023	09-04-2023	
14031	HADI SOSRO		29/03/2023	Harus 30-03-2023	Sisa 31-03-2023	04-04-2023	05-04-2023	07-04-2023	08-04-2023	09-04-2023	
14124	KUANG GUITO		29/03/2023	Harus 30-03-2023	Sisa 31-03-2023	04-04-2023	05-04-2023	07-04-2023	08-04-2023	09-04-2023	
14293	RAHMAT HALIM		17/03/2023	Harus 27-03-2023	Harus 28-03-2023	29-03-2023	30-03-2023	04-04-2023	05-04-2023	06-04-2023	
14296	RAHMAT HALIM		20/03/2023	Harus 30-03-2023	Harus 01-04-2023	04-04-2023	05-04-2023	07-04-2023	08-04-2023	09-04-2023	
14041	RAHMAT HALIM		20/03/2023	Harus 30-03-2023	Harus 01-04-2023	04-04-2023	05-04-2023	07-04-2023	08-04-2023	09-04-2023	

Tabel 10 Monitoring berkas setelah kegiatan aksi perubahan

Selain di replikasi untuk pengawasan layanan kegiatan Kantor pertanahan Kabupaten Gresik, Bersama Dinas PUTR, kami diberikan kesempatan oleh Direktorat sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di DIRJEN Tata Ruang untuk turut serta memberikan masukan terkait NSPK KKPR Non berusaha yang selama ini belum terakomodir dalam OSS-RBA.

Dalam kegiatan FGD tersebut ini Kabupaten Gresik bisa menerapkan KKPR berusaha dengan baik secara teknis maupun anggaran. Apalagi untuk KKPR Non Berusaha sudah terbangun sinkronisasi data antara Kantah dan Dinas PUTR melalui Aplikasi Go Putar.



Gambar 23 FGD Kantah P2, Dinaas PUTR dan Direktorat Sinkronisasi Ruang

2. Eksternal

Terjalannya hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Kantor Pertanahan hal bisa diadopsi adalah 3K (Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi) untuk melayani PKKPR secara profesional dan transparan. Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan KKPR secara fisik dan Penyerapan anggaran sinkronisasi pemanfaatan ruang yang ada di DIPA Kantah. Target DIPA sejumlah 52 layanan Rp.356.160.000,- dan sudah terealisasi 28.79%. Hal tersebut dapat menjadi adopsi bagi kantor pertanahan yang lain.



Gambar 24 3K Bersama Pemkab dan Kantah Kab.Gresik

BAB VI

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

1. Perbaiki Layanan PTP Berbasis Digital mendukung sistem investasi daerah

Jangka menengah aksi perubahan ini dapat terlihat perbaikan dari PTP dengan penyelesaian PKKPR maupun PTP sesuai dengan SOP untuk perbaikan layanan PTP sudah semakin baik dengan rata-rata penyelesaian PTP 15 Hari Kerja yang sebelumnya kegiatan aksi perubahan 30 hari kerja dengan dasar KKP Tanggal 30 Juli 2023. Dengan harapan semakin baik sampai 6 bulan kedepan. Termasuk kegiatan PKKPR yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten Gresik.

2. Terbangun ekosistem digital dalam layanan PTP

Pemanfaatan TI mengefisiensikan proses waktu maupun tempat dalam layanan penyelesaian PKKPR berusaha. Dalam jangka menengah diharapkan terdapat sistem yang benar-benar full digital untuk layanan KKPR baik Pusat maupun daerah. Aplikasi Go Putar yang sudah di miliki oleh Pemkab dapat di bangun lebih baik dengan server yang mumpuni sehingga persyaratan dokumen PTP pun bisa dapat di tampung secara digital.

3. Menjadi layanan unggulan di bidang pertanian

Saat ini yang di launching oleh kementerian 7 layanan Prioritas mulai. HT, Roya, SKPT, Pengecekan, Perubahan hak, Pendaftaran SK dan Peralihan Hak. Namun tidak menutup kemungkinan layanan PTP untuk seluruh mendukung seluruh kegiatan akan dimaksimalkan capaiannya sesuai SOP yang ada.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

Berdasarkan data di sipk.atrbpn.go.id dapat dilihat terkait dengan profil kompetensi pada diri dan teknis yang perlu dikembangkan yaitu Pengembangan Diri dan Orang lain, Pengambilan Keputusan dan Perekat bangsa. Sedangkan untuk kompetensi teknis adalah di bidang penataan ruang. Pelaksanaan pengembangan potensi diri sesuai dengan rancangan aksi perubahan dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

No	Pihak Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi (Klasikal/Non Klasikal)	Pelaksanaan
	Internal			
1	Kepala Seksi dan Koorsub	<i>Mindset</i> melayani kepuasan masyarakat prioritas utama	Non Klasikal : Bintek Kepala Kantor dan komitmen Bersama	Terlaksana dengan Monev setiap minggu
2	Petugas Locket	Pelayanan Digital	Klasikal : Bintek Kasubag TU dan Kepala Seksi	Terlaksana setiap minggu setelah apel pagi
3	Petugas Pelaksana seksi P2	Pemahaman SOP pelayanan PTP, Melek digital	Non Klasikal : Bintek Kepala seksi P2	Terlaksana dengan Monev setiap minggu
4	<i>Admin Command Center</i>	Pemahaman SOP layanan aduan	Non Klasikal : Bintek kasubag TU	Terlaksana dengan Monev setiap minggu
	Eksternal			
1	DPMPSTP/DPUTR	PTP digital	Non Klasikal : Sosialisasi , Pamflet dan <i>Banner</i>	Terlaksana dengan

				monitoring KKPR
2	Asosiasi Pengusaha (REI/ HIMPER)	PTP Digital	Non klasikal : sosialisasi	Terlaksana dengan sosialisasi pertanahan

Tabel 11 Pelaksanaan pengembangan potensi diri

Dalam kegiatan pengembangan potensi juga diikuti dengan kegiatan pengembangan lain nya seperti mengikuti *Webinar* , Bimtek maupun pelatihan secara daring maupun luring. Salah satunya adalah kegiatan BIMTEK KKPR yang dilakukan oleh Kanwil BPN Prop. Jawa Timur.



Gambar 25 Bimtek KKPR Kanwil BPN Prop. Jawa Timur

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Aksi Perubahan dalam kegiatan PKP ini menjadi laporan untuk pengembangan potensi dan meningkatkan kompetensi diri secara terstruktur dan sistematis sehingga melengkapi kekurangan/gap yang dimiliki oleh peserta. Peserta PKP harus mampu meningkatkan kualitas layanan dimasing-masing unit kerja dengan memberikan inovasi/terobosan serta gagasan dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan yang sedang terjadi di unit kerja. Dalam laporan aksi perubahan **“Peningkatan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Berbasis Digital Dalam Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik”** dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan salah satunya mengurangi gap penyelesaian PTP yang tidak sesuai dengan SOP.

Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan beberapa terobosan dan inovasi yang didesain untuk mempercepat layanan yaitu: **SIMETRIS, SI PETE, dan CCT** yang berbasis digital dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang saat ini dengan harapan kepuasan masyarakat menjadi prioritas utama.

Tahapan-tahapan untuk tercapainya gagasan memerlukan dukungan potensi diri dan kompetensi teknis sehingga bisa sesuai capaiannya dengan target-target yang berjangka pendek (2 bulan), jangka menengah (6 Bulan) dan jangka Panjang (setahun). Serta, perlu adanya dukungan bersama di tingkat pimpinan sehingga terbentuk sebuah integrasi dan sinergi bersama dalam memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Kesuksesan dari tahapan juga tergantung sistem pengendalian secara internal maupun eksternal sehingga dapat diberikan solusi ketika ada permasalahan yang ketemu di dalam kegiatan aksi perubahan.

B. Saran

Pelaksanaan Aksi perubahan ini masih jauh dari kata sempurna, namun perbaikan tidak hanya berhenti pada satu titik waktu dan tempat namun terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman yang ada. Perubahan juga dibutuhkan mengikuti perkembangan tersebut. Kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi menjadi sebuah senjata untuk menjawab tantangan perubahan global yang semakin kedepan tantangan semakin berat.

PKKPR yang merupakan Amanah UUCK untuk mempermudah investasi diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kebijakan termasuk dalam memberikan layanan PTP sebagai sistem yang mensupport PKKPR.

Daftar Pustaka

- Darmawan, C dkk. (2021) Etika Dan Integritas Kepemimpinan Pancasila. Jakarta.
- Darmawan, C dkk. (2021) Bela Negara Kepemimpinan Pancasila. Jakarta.
- Wijaya. Bmedia. (2019). UUD 1945 & Perubahannya. Jakarta: Penerbit Bmedia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/pemerintah>)
- Maulida, Monika (2017) Reaksi Keluarga Penderita ISPA terhadap Dampak Industri (Studi tentang resistensi Keluarga Penderita ISPA terhadap PT Petrokimia Gresik di desa Rooma, Kec. Manyar, Kab Gresik. (diakses Rabu 15 Maret 2023).
- Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang perubahan PerPU no 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 yang diubah dengan PP No 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Pelatihan Dasar CPNS Analisis Penetapan Isu dengan APKL dan USG - Hadi Kurniawan (hadikurniawanapt.blogspot.com) (Diakses Pada tanggal 15 Maret 2023)

